

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan utama dari perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan kemakmuran dari para pemilik atau pemegang saham. Meningkatkan nilai perusahaan dapat dilakukan dengan cara pengaturan kegiatan manajemen yang salah satunya melalui manajemen keuangan. Kegiatan dalam pengelolaan keuangan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu kegiatan dalam mencari sumber dana dan kegiatan penggunaan dana (Hanafi,2012:3).

Menurut Baridwan (2007) utang merupakan pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang mungkin terjadi akibat kewajiban suatu badan usaha pada masa kini untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa pada badan usaha lain dimasa yang akan datang. sebagai akibat dari transaksi yang dimasa yang lalu. Kebijakan utang merupakan kebijakan perusahaan untuk memanfaatkan fasilitas pendanaan dari luar, kebijakan utang dapat dipengaruhi oleh karakteristik khusus perusahaan yang mempengaruhi kurva penawaran hutang pada perusahaan atau permintaan perusahaan atas utang.

Hutang adalah kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban saat ini entitas tertentu untuk

mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu (Kieso at al., 2011:172). Kebijakan pendanaan suatu perusahaan dapat dilihat dari rasio solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Kasmir, 2009:151).

Kebijakan hutang adalah segala jenis utang yang dibuat atau diciptakan oleh perusahaan. Baik utang lancar maupun utang jangka panjang. Dana yang diperoleh dari utang akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Penggunaan utang dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena perusahaan dianggap memiliki kemampuan dan prospek oleh investor. Selain itu dengan menggunakan dana yang berasal dari utang perusahaan akan memperoleh keuntungan penghematan pajak atas laba perusahaan. Namun dalam menetapkan kebijakan hutang, manajer harus lebih hati-hati dan mempertimbangkan keuntungan serta kerugiannya karena kegagalan perusahaan dalam melunasi utang dapat mengancam likuiditas perusahaan.

Keputusan pembiayaan melalui utang mempunyai batasan sampai seberapa besar dana dapat digali atas dasar manfaat yang dapat diperoleh dari utang tersebut. Biasanya ada standar rasio tertentu untuk menentukan rasio utang yang tidak boleh dilampaui. Jika rasio utang melewati standar ini, maka biaya akan meningkat dengan cepat, dan hal tersebut akan mempengaruhi struktur modal perusahaan. Perusahaan yang menggunakan semakin banyak utang maka akan meningkatkan beban bunga dan pokok pinjaman yang harus

dibayar. Hal ini memperbesar kemungkinan perusahaan menghadapi default, yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya akibat kewajiban yang semakin besar, namun apabila perusahaan hanya menggunakan modal sendiri (laba ditahan) yang jumlahnya kecil maka akan menutup kesempatan dalam memperoleh keuntungan dari yang diharapkan, sehingga sangat dibutuhkan ukuran penentuan jumlah proporsi utang yang optimal bagi perusahaan dalam memperoleh manfaat dibandingkan dengan biaya yang dibayarkan. Oleh karena itu perusahaan harus sangat berhati-hati dalam menentukan kebijakan hutangnya karena peningkatan pengguna hutang akan menurunkan nilai perusahaan.

Salah satu kasus kebijakan hutang terjadi pada tahun 2018 PT Sariwangi Agricultural Estate Agency telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Perusahaan pengolahan teh ini dianggap telah melanggar perjanjian perdamaian soal utang piutang dengan PT Bank ICBC Indonesia. Setelah tagihan kredit utang bermasalah Bank ICBC Indonesia sepakat dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Total utang Sariwangi kepada Bank ICBC Indonesia saat itu mencapai US\$ 20.505.166 atau sekitar Rp 309,6 miliar. Namun sejak perjanjian itu pihak Sariwangi tidak memenuhi perjanjian dengan membayar cicilan utang. Hingga akhirnya PT Bank ICBC Indonesia mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian. Berbarengan dengan Sariwangi, Bank ICBC Indonesia juga meminta pembatalan perjanjian perdamaian kepada PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung. Total utang perusahaan ini mencapai \$ 2.017.595

dan Rp. 4.907.082.191. Kuasa hukum ICBC, Swandy Halim dari Kantor Hukum Swandy Halim & Partners, menjelaskan sebelumnya para pihak terkait sudah sepakat dalam perjanjian perdamaian terkait utang kedua entitas tersebut pada 9 Oktober 2015. Namun utang yang seharusnya dicicil tidak dilakukan.

Kasus selanjutnya yaitu dari PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan sejumlah bank asing senilai US\$ 1,28 miliar (Rp 18,97 triliun, kurs Rp 14.800/US\$). Fasilitas ini akan digunakan perusahaan untuk membiayai pengambilalihan PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB). Fasilitas pinjaman tersebut diberikan oleh sejumlah bank, yakni Bank BNP Paribas, Deutsche Bank AG Singapore Branch, Maybank Kim Eng Securities Ltd, MUFG Bank dan Standard Chartered Bank. Pinjaman tersebut memiliki tenor sepanjang 24 bulan sejak ditanda tangani pada 12 November 2018.

Setelah mengakuisisi Holcim, Semen Indonesia optimistis dapat memperluas jaringan di pasar dalam negeri, melakukan diversifikasi jenis produk, serta meningkatkan efisiensi biaya distribusi dan bahan baku sekaligus memperkuat posisi bisnis ready mix. Rencananya, usai menyelesaikan transaksi pembelian ini, perusahaan semen milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan fokus mendiversifikasi bisnis di dalam negeri di bidang material bangunan (www.cnbcindonesia.com).

Dari fenomena di atas pada prinsipnya perusahaan memerlukan sebuah kebijakan hutang untuk merancang pertumbuhan perusahaan dengan maksimal. Dalam hal yang dilakukan oleh perusahaan di atas ternyata hutang membuat perusahaan menggunakan kebijakan hutang.

Kesalahan pengambilan keputusan pendanaan sering kali berawal dari pemahaman dan keinginan yang berbeda dari pemegang saham dan pihak manajemen perusahaan. Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat diperkecil dengan suatu mekanisme pengawasan. Akibat dari munculnya mekanisme pengawasan tersebut menyebabkan timbulnya suatu cost yang disebut *agency cost* (Purwasih, 2014). Masalah yang muncul akibat konflik kepentingan antara manajemen dengan meningkatkan tingkat kepemilikan saham oleh manajemen (Jensen dan Meckling, 1976). Kepemilikan ini akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Dengan demikian manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan akan menggunakan hutang secara optimal.

Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang menyangkut masalah pembagian laba yang menjadi hak pemegang saham. Pemegang saham mempunyai hak untuk menjual saham setiap saat, sehingga perputaran jual beli saham sangat cepat dan berubah-ubah maka menentukan siapa yang berhak atas dividen menjadi sulit, sehingga diperlukan prosedur mengatur pembayaran dividen. Kebijakan dividen akan memiliki pengaruh pada tingkat penggunaan hutang suatu perusahaan. Kebijakan dividen yang stabil akan menyebabkan adanya keharusan bagi perusahaan untuk menyediakan sejumlah dana guna

membayar jumlah dividen yang tetap tersebut (Widya, 2011). Hal ini mengakibatkan manajemen harus melakukan cara untuk memperoleh sumber dana yang relevan dengan utang.

Perusahaan yang sehat pasti mempunyai profitabilitas yang baik. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba selama periode tertentu. Profitabilitas dapat menjadi tolak ukur ataupun gambaran tentang efektivitas kinerja manajemen ditinjau dari keuntungan yang diperoleh dibandingkan dari hasil penjualan dan investasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi cenderung akan menggunakan utang yang lebih kecil, karna laba ditahan sudah cukup untuk membiayai operasional perusahaan ataupun kegiatan investasi yang baru.

Penelitian mengenai kebijakan hutang sudah di teliti beberapa sumber yaitu, Astuti (2014); Pradana, dkk (2014); Purwasih, dkk (2014); Hasan (2014); Dewi, Yuniarti (2013); Syadeli (2013); Hidayat (2013); Nabela (2012); Susanto (2011); dan Djadib (2009) namun terdapat perbedaan hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya. Hal itu lah yang membuat peneliti tertarik untuk menguji kembali faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah beberapa variable yang di gunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Maka dari uraian latar belakang diatas peneliti akan menguji kembali **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Dividen, Dan**

Profitabilitas Terhadap kebijakan Hutang” pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan hutang?
2. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap kebijakan hutang?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan hutang?

C. Tujuan Penelitian

Sehubung dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan fakta dan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan hutang,
2. Memberikan fakta dan bukti empiris mengenai pengaruh kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang,
3. Memberikan fakta dan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan hutang

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis terhadap berbagai pihak yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat menambah pemahaman dalam memperkaya pengetahuan yang berhubungan tentang pengaruh kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, dan profitabilitas terhadap kebijakan hutang. Selain itu juga sebagai masukan atau kajian lebih lanjut dan bahan perbandingan bagi penelitian lain yang mempunyai kepentingan berbeda untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan juga akan memperoleh manfaat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi perusahaan yang berkepentingan, seperti yang dijabarkan berikut ini:

1. Kepemilikan Manajerial digunakan untuk pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan.
2. Kebijakan Dividen memberikan penjelasan kepada para investor bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa-masa mendatang.
3. Profitabilitas digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki, agar dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya.
4. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

dalam mengambil kebijakan perusahaan terutama pada perusahaan manufaktur